

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alokasi dana bantuan keuangan kepada partai pada dasarnya dirumuskan dengan tujuan lebih meminimalisasikan terjadinya praktik korupsi serta mengurangi tingkat ketergantungan partai politik terhadap sumber pendanaan. Bantuan keuangan ini ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sumber dana yang bersumber dari pemerintah maupun dari sektor swasta. Dengan adanya kebijakan tersebut, seluruh partai politik dapat bersaing secara proporsional dan setara dengan mendukung pluralisme dalam kehidupan politik. Sedangkan, di Jerman dana dialokasikan berdasarkan perolehan suara partai dalam pemilu, pemilihan Presiden, atau keterwakilan dalam parlemen. Berbagai ragam pendanaan negara langsung ditemukan di dunia, seperti subsidi diberikan langsung oleh negara yang ditetapkan dalam APBN di Jerman. Dana bantuan di Jerman dari pemerintah dimanfaatkan oleh partai politik untuk menyelenggarakan pendidikan politik.
2. Pertanggungjawaban pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Indonesia Pendanaan yang berasal dari APBN kepada partai politik tentunya partai politik memiliki tanggungjawab berupa adanya kewajiban pertanggungjawaban pengelolaan dana bantuan keuangan dari negara. Dalam hal inilah partai politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan

pengeluaran dari dana bantuan keuangan. Selain itu, partai politik juga harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari dana APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah setelah dilakukan Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana dari APBN ini diketahui oleh masyarakat serta partai politik dapat mengumumkannya kepada publik. Di Jerman berdasarkan Undang-Undang partai politik di Jerman wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan kepada Presiden Bundestag, yang mana laporan ini mencantumkan sumber dana penggunaan semua dana yang diterima selama tahun tersebut termasuk daftar aset partai. Partai politik di Jerman mendapatkan bantuan dana dari negara, yang bersumber dari iuran anggota dan sumbangan individu maupun perusahaan. Jumlah dana yang diterima masing partai politik dari negara mendapatkan dana tergantung dengan perolehan suara dalam pemilihan umum nasional, pemilihan umum negara bagian dan pemilihan umum di Eropa. Di mana, dana dialokasikan berdasarkan perolehan suara partai dalam pemilu, pemilihan Presiden, atau keterwakilan dalam parlemen. Berbagai ragam pendanaan negara langsung ditemukan di dunia, seperti subsidi diberikan langsung oleh negara yang ditetapkan dalam APBN di Jerman. Dana bantuan di Jerman dari pemerintah dimanfaatkan oleh partai politik untuk menyelenggarakan pendidikan politik. Jerman merupakan contoh ideal dalam penggunaan dana bantuan pemerintah bagi partai politik.

B. Saran

1. Untuk alokasi dana anggaran pendapatan dan belanja negara partai politik di Indonesia, pemerintah dapat memperketat kemampuan partai dalam mengelola pendanaan secara terbuka, akuntabel dan profesional. Serta perlu meningkatkan transparansi publik dengan mewajibkan publikasi terbuka dan pertanggungjawaban dana. Hal ini dapat mencakup kelancaran dan kepatuhan partai politik dalam menyusun laporan pertanggungjawaban, serta memberikan akses publik terhadap laporan keuangan, dan mengevaluasi kinerja partai dalam sistem politik di Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk menentukan apakah pendanaan dari negara kepada partai politik dapat dilanjutkan atau dihentikan. Seperti praktik di Jerman yang sistem pendanaannya menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabel yang tinggi dalam menjaga integritas keuangan partai politik, walaupun sistem sudah relatif bagus, namun pengawasan publiknya dapat diperluas untuk mempermudah masyarakat.
2. Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan untuk memperbarui regulasi pendanaan partai politik serta mekanisme pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan partai, baik dari iuran maupun sumbangan yang sah menurut hukum. Serta, pemerintah juga harus mempertimbangkan perubahan terkait sumber keuangan partai yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Hal ini dapat bertujuan agar pemerintah memiliki kendali penuh dalam mengawasi perputaran keuangan partai politik. maka dari itu perlu lebih dipertegas

terhadap pengelolaan dana partai politik dan menciptakan sistem politik yang bersih dan sehat serta demokratis, agar mencegah potensi korupsi yang dapat merugikan demokrasi di Indonesia, dan Indonesia bisa mengadopsi praktik transparansi terbuka di Jerman untuk memperkuat demokrasi dan mencegah korupsi politik. Walaupun Jerman sudah transparan, dan mekanisme publikasi laporannya baik, perlu juga diperhatikan lebih pada pengawasan sumbangan swasta untuk mencegah potensi pengaruh berlebihan dari kelompok kepentingan.

